



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 561 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM LEGISLASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ambon perlu dilakukan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon, Peraturan Walikota dan Peraturan Negeri/Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Walikota dan Peraturan Negeri/Desa, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Melakukan Fasilitasi, Pengkajian, penyelerasian dan Harmonisasi Draft Rancangan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Negeri).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Juni 2019

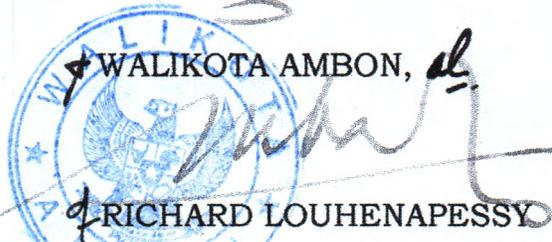
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSEY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 561 TAHUN 2019
 TANGGAL : 17 Juni 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 LEGISLASI RANCANGAN
 PRODUK HUKUM DAERAH

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Tupamahu, SH	Asisten Tata Pemerintahan	Pengarah
2.	S. Slarmanat, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
3.	B. R. Atarwaman, SH	Sub Bagian Perundang- Undangan	Sekretaris
4.	H. M. Far Far, SH, MH	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku	Anggota
5.	Alwiyah. F. Alaydrus, SH, MH	Kabag Perundang- Undangan Setda Provinsi Maluku	Anggota
6.	V. M. Pitries. S. Sos	Sub Bagian Umum dan Dokumentasi Hukum	Anggota
7.	L. M. Manuputty, SH	Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
8.	Rosa. Y. Imoliana, SH	Kasubag Perundang- Undangan Setda Provinsi Maluku	Anggota
9.	S. J. Latuputty	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
10.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
11.	M. Luhulima, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
12.	Ny. A. Uar	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
13.	J. Resirwawan	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
14.	Taty Rahareng, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
15.	S. M. Nussy, SE	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
16.	F. L. Tuju, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
17.	M. de Fretes, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
18.	F. Selay, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
19.	R. A. Mailoa, S. Kom	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
20.	Ny. Evelyn Kamanasa	Staf pada Bagian Hukum	Anggota

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY